

PENGARUH PEMAHAMAN ATAS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Grace Saschia Putri ¹, Ali Djamhuri ²
 Universitas Brawijaya

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: grace.putri17@gmail.com | | No. Telp: |
| Submitted 3 Februari 2025 | Accepted 9 Februari 2025 | Published 10 Februari 2025 |

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Jenis data penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dari responden dan diolah dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Secara parsial, hanya pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan yang berpengaruh signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi SDM tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas teknologi dan kualitas kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Keterbatasan penelitian ini adalah perlu dilakukan pendampingan saat pengisian kuesioner, fokus pada satu lokasi. Penelitian ini memberikan implikasi untuk meningkatkan pemahaman SAP dan pengembangan kompetensi SDM.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the understanding of government accounting standards (SAP), information technology utilization, internal control systems, and human resource competence on the financial statement quality of the Jayawijaya District Government. The primary data involved in this study are collected through questionnaires distributed to respondents and analyzed by SPSS. The results exhibit that, simultaneously, all four independent variables have a significant effect on the financial statement quality. Partially, only the understanding of government accounting standards has a significant effect while information technology utilization, internal control systems, and human resource competence do not show significant results. This indicates that the effectiveness of technology use and the quality of human resource competence requires improvements for better financial statement quality. The limitations of this study include the need for assistance during questionnaire completion and its focus on a single location. This study provides implications for enhancing the understanding of SAP and improving human resource competence.

Keywords: Government Accounting Standards (SAP), Information Technology, Internal Control System, Human Resource Competency, Financial

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam mengelola dan menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Salah satu aspek utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan pemerintah adalah kualitas laporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan. Laporan keuangan yang transparan dan berkualitas merupakan cerminan dari akuntabilitas serta pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kualitas laporan keuangan ini menjadi semakin penting karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, lembaga legislatif, lembaga

pengawas, serta investor yang membutuhkan informasi yang akurat untuk menilai kondisi keuangan daerah (PP No. 71, 2010).

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (UU No.17, 2003). Laporan keuangan harus memenuhi prinsip – prinsip standar akuntansi pemerintahan (SAP), yaitu relevansi, keandalan, komparabilitas, dan pemahaman yang jelas bagi penggunaanya (PP No. 71, 2010). Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern yang efektif, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan (PP No 12, 2019). Kabupaten Jayawijaya, yang terletak di Provinsi Papua Pegunungan, menjadi salah satu daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, penggunaan SIPD di Kabupaten Jayawijaya menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, informasi dan rendahnya tingkat pelatihan sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut (BPK-RI, 2023).

Meskipun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut – turut, temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan (BPK-RI, 2020). Hal ini menjadi latar belakang penting untuk melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya, dengan fokus pada faktor – faktor seperti pemahaman standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia.

Kelemahan dalam sistem pengendalian intern memberikan gambaran tentang tantangan teknis yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, aspek tersebut juga dapat dilihat dari perspektif teoritis untuk memahami hubungan antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, teori agensi memberikan landasan konseptual yang relevan untuk menjelaskan dinamika tersebut, terutama dalam konteks tanggung jawab dan transparansi pengelolaan sumber daya publik.

Teori agensi relevan untuk menjelaskan antara hubungan antara pejabat pengelola keuangan daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat sebagai prinsipal untuk mengelola dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Ketidaktepatan dalam pengelolaan tersebut, seperti yang terlihat dalam keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, dapat menciptakan masalah agensi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian yang lebih baik sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah dan publik.

Selain itu, teori kepatuhan juga relevan dalam penelitian ini karena kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. pemerintah daerah yang tidak mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berisiko menghasilkan

laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan dan tidak akuntabel. Kepatuhan terhadap peraturan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman dan pelatihan bagi sumber daya manusia serta adanya sistem pengendalian internal yang efektif (PP No. 71 Tahun 2010; Sutrisno, 2019; Darise, 2020).

Kabupaten Jayawijaya dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama, daerah ini menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur teknologi informasi, di mana jaringan internet yang belum merata menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan sistem elektronik untuk pengelolaan keuangan daerah. Kedua, meskipun SIPD telah diterapkan, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pelatihan yang memadai bagi sumber daya manusia, serta pengembangan sistem yang belum optimal. Ketiga, meskipun Kabupaten Jayawijaya berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK, kualitas laporan keuangan masih dipengaruhi oleh kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Keempat, sebagai daerah yang terletak di wilayah terpencil, Jayawijaya membutuhkan perhatian khusus dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem pengelolaan keuangan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pemerintahan daerah (Wenda, Laoh, & Tarore, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Dengan memahami berbagai tantangan dan kondisi yang ada, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dilakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pemahaman Atas Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya”**

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sekaran & Bougie (2019) penelitian merupakan seluruh proses yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis, tekun, kritis, objektif dan logis. Saunders et al. (2016) mendefinisikan penelitian sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh manusia secara sistematis untuk mengetahui sesuatu, sehingga meningkatkan pengetahuan mereka. Penelitian ini bersifat kuantitatif, jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dari responden dan diolah dengan menggunakan SPSS. Isi kuesioner adalah daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan pada responden yang dipilih secara *purposive*.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau benda yang dijadikan objek penelitian karena memiliki karakteristik tertentu. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini mencakup pengelola unit kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jayawijaya, yang terdiri dari 27 SKPD, sedangkan distrik – distrik tidak termasuk karena pengelolaannya berada di bawah Sekretariat Daerah.

Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SKPD memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan daerah. Setiap SKPD bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kerja yang telah dirancang, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Tabel 3. 1
Populasi SKPD Kabupaten Jayawijaya

| No | Badan/Dinas/Kantor |
|----|--|
| 1 | Dinas Pendidikan |
| 2 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7 | Dinas Sosial |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 14 | Dinas Perhubungan |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 16 | Dinas Penanaman Modal, Koperasi, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 17 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 20 | Dinas Perikanan |
| 21 | Dinas Pertanian |
| 22 | Sekretariat Daerah |
| 23 | Sekretariat DPRD |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 26 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 27 | Inspektorat |
| 28 | Distrik Wamena |
| 29 | Distrik Kurulu |
| 30 | Distrik Asologaima |
| 31 | Distrik Hubikosi |
| 32 | Distrik Bolakme |
| 33 | Distrik Asolokobal |
| 34 | Distrik Walelagama |
| 35 | Distrik Musatfak |
| 36 | Distrik Wollo |
| 37 | Distrik Palebaga |
| 38 | Distrik Yalengga |
| 39 | Distrik Trikora |
| 40 | Distrik Napua |
| 41 | Distrik Walaik |
| 42 | Distrik Wouma |
| 43 | Distrik Hubikiak |

| | |
|----|-----------------------------------|
| 44 | Distrik Ibele |
| 45 | Distrik Tailarek |
| 46 | Distrik Itlay Hisage |
| 47 | Distrik Siepkosi |
| 48 | Distrik Usilimo |
| 49 | Distrik Wita Waya |
| 50 | Distrik Libarek |
| 51 | Distrik Wadangku |
| 52 | Distrik Pisugi |
| 53 | Distrik Koragi |
| 54 | Distrik Tagime |
| 55 | Distrik Molagalome |
| 56 | Distrik Tagineri |
| 57 | Distrik Silo Karno Doga |
| 58 | Distrik Piramid |
| 59 | Distrik Muliama |
| 60 | Distrik Bugi |
| 61 | Distrik Bpiri |
| 62 | Distrik Walesi |
| 63 | Distrik Asotipo |
| 64 | Distrik Maima |
| 65 | Distrik Wesaput |
| 66 | Distrik Wame |
| 67 | Distrik Popukoba |
| 68 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti yang hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasikan untuk mendapatkan simpulan atas populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Entitas akuntansi yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK – SKPD) dan Bendahara Pengeluaran, sehubungan pejabat tersebut terlibat langsung dalam proses transaksi keuangan SKPD termasuk penyusunan laporan keuangan SKPD.
2. Entitas pelaporan yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Anggaran, dan Kepala Sub Bidang Akuntansi, dengan alasan bahwa pihak-pihak tersebut terlibat langsung secara teknis dalam proses konsolidasi laporan keuangan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan dengan asumsi bahwa dalam periode tersebut sudah memiliki pengalaman dan memahami proses penyusunan laporan keuangan.
4. Tingkat pendidikan minimal SMA/ sederajat untuk pihak-pihak yang terlibat langsung dengan pengelolaan laporan keuangan, dengan asumsi bahwa tingkat pendidikan SMA/ sederajat dianggap sudah mempunyai kemampuan yang memadai dan tidak gagap teknologi.

Jumlah sampel penelitian ini terdiri dari 3 orang pegawai pada masing-masing entitas akuntansi di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memenuhi kriteria untuk dijadikan responden. Dengan total 27 SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka jumlah responden dalam penelitian ini adalah **27 SKPD × 3 orang = 81 orang**.

Pemilihan 3 orang responden dari setiap SKPD dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai aspek dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat terwakili. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah melibatkan entitas akuntansi, yaitu **Pengguna Anggaran (PA)** yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pada satuan kerjanya, **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)** yang berperan dalam pengelolaan keuangan, termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan dan **Bendahara Pengeluaran yang** bertugas mengelola kas dan melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga kelompok ini dipilih karena masing-masing memiliki tanggung jawab dan perspektif spesifik dalam pengelolaan keuangan daerah, yang relevan untuk mendukung tujuan penelitian. Dengan demikian, sampel yang dipilih diharapkan dapat memberikan data yang representatif untuk menjawab permasalahan penelitian serta menguji hipotesis yang diajukan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yang merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari objek penelitian, dan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari pihak terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari SKPD Pemerintah Jayawijaya dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada responden yang merupakan pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan bendahara.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan teknik survei dengan memberikan kuesioner yang langsung diberikan kepada responden sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya kuesioner penelitian ini menggunakan item-item pertanyaan yang jawabannya dengan bobot 1 sampai 5 untuk tingkat setuju atau tidak setuju. Kuesioner diadaptasi dari kuesioner penelitian sebelumnya yang telah dimodifikasi. Kuesioner ini menggunakan skala Likert, yang berfungsi untuk mengukur pendapat, dan persepsi individu atau kelompok mengenai fenomena sosial. Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Indikator-indikator ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun item-item instrumen, baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan kategori:

Tabel 3. 2

Tabel Skala Pengukuran Likert

| Pertanyaan | Bobot |
|---------------------|-------|
| Sangat Setuju | 5 |
| Setuju | 4 |
| Netral | 3 |
| Tidak Setuju | 2 |
| Sangat Tidak Setuju | 1 |

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Konsep dan variabel yang bersifat abstrak dalam penelitian memerlukan definisi operasional untuk mengubahnya menjadi konsep yang lebih konkret. Definisi operasional ini berfungsi untuk memberikan kejelasan tentang bagaimana variabel tersebut diukur atau diamati selama penelitian dilakukan. Dengan definisi operasional yang jelas, peneliti dapat secara konsisten mengukur

variabel-variabel yang terlibat, memastikan keandalan dan keabsahan data yang dikumpulkan, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tabel 3.3
Indikator Variabel

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala Ukur |
|--|---|---|--------------|
| Independen | | | |
| Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (x_1) | Proses untuk mengerti benar tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Mardiasmo, 2018). | Pengukuran Pencatatan Pelaporan | Skala Likert |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (x_2) | Pemanfaatan terhadap suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi (Mardiasmo, 2018) | Tingkat Kecepatan Tingkat Keamanan Tingkat efisiensi biaya Tingkat Kualitas hasil | Skala Likert |
| Sistem Pengendalian Intern (X3) | Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011). | Lingkungan pengendalian Penilaian risiko Kegiatan pengendalian Informasi Komunikasi Pemantauan | Skala Likert |
| Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4) | Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010) | Pengetahuan Keterampilan Sikap | Skala Likert |
| Dependen | | | |
| Kualitas Laporan Keuangan (Y) | Tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan | Relevan Andal Dapat dibandingkan | Skala Likert |

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|--|
| | pemerintah daerah (Bastian, 2011). | Dapat dipahami | |
|--|---------------------------------------|----------------|--|

Sumber : Diolah dari berbagai referensi

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merujuk pada faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab atau berpengaruh terhadap perubahan pada variabel dependen dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, variabel independen terdiri dari empat, yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan (dilambangkan sebagai "X1") pemanfaatan teknologi informasi (dilambangkan sebagai "X2") sistem pengendalian intern (dilambangkan sebagai "X3") dan kompetensi sumber daya manusia (dilambangkan sebagai "X4"). Dengan menggunakan simbol ini, penelitian bertujuan untuk meneliti bagaimana ketiga faktor ini mempengaruhi variabel dependen yang sedang diteliti. Dengan demikian, hubungan antara ketiga faktor tersebut dan variabel dependen dapat dieksplorasi lebih lanjut.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang terpengaruh oleh variabel independen dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, variabel yang menjadi fokus adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang ditandai dengan simbol "Y". Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana variabel independen, seperti pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi, mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menekankan variabel dependen ini, tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi dampak atau keterkaitan antara variabel independen dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman atas standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Penelitian ini dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner pada 27 SKPD yang ada di Pemda Kabupaten Jayawijaya. Pendistribusian dan pengisian kuesioner dilakukan pada tanggal 13 – 25 juni 2024. Responden dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK - SKPD), dan bendahara yang berjumlah 81 orang dengan latar belakang berbeda – beda, maka dibuat deskripsi profil responden dengan karakteristik data sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden

| Data Deskriptif | Keterangan | Jumlah | Presentase (%) |
|-----------------|---------------|--------|----------------|
| Jenis Kelamin | Pria | 32 | 46,7% |
| | Wanita | 28 | 53,3% |
| Umur | 20 – 35 tahun | 8 | 13,3% |
| | 36 – 50 tahun | 29 | 48,3% |
| | >50 tahun | 23 | 38,3% |

| | | | |
|--------------|---------------------|----|-------|
| Pendidikan | SMA | 2 | 3% |
| | D3 | 3 | 5% |
| | S1 | 32 | 53% |
| | S2 | 20 | 33% |
| | Lainnya | 3 | 5% |
| Jurusan | Akuntansi | 3 | 5% |
| | Ekonomi | 7 | 12% |
| | Administrasi Publik | 9 | 15% |
| | Lainnya | 41 | 68% |
| Lama Bekerja | 2 – 5 tahun | 5 | 8,3% |
| | 5 – 10 tahun | 3 | 5% |
| | >10 tahun | 52 | 87,7% |

(Sumber: Diolah Peneliti, 2024)

Hasil Analisis Deskriptif

Data penelitian dapat dideskripsikan menggunakan analisis deskriptif untuk melihat distribusi data yang nantinya diolah dalam penelitian serta dapat memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata – rata (*mean*), dan standar deviasi.

Tabel 4. 2
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------|----|---------|---------|---------|----------------|
| SAP | 60 | 17,00 | 30,00 | 25,2500 | 2,63371 |
| SPI | 60 | 12,00 | 40,00 | 31,6333 | 5,20093 |
| TI | 60 | 16,00 | 30,00 | 24,2833 | 2,79280 |
| KSDM | 60 | 14,00 | 25,00 | 20,0667 | 1,98184 |
| LK | 60 | 25,00 | 35,00 | 30,4833 | 2,59394 |

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024)

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden masing – masing variabel berjumlah 60 orang, variabel SAP memiliki nilai minimum 17 dan maksimum 30, nilai rata – rata variabel SAP masing – masing responden sebesar 25,25 dengan persebaran rata – rata sebesar 2,63. Variabel SPI memiliki nilai minimum 12 dan maksimum 40, nilai rata – rata variabel SPI masing – masing responden sebesar 31,63 dengan persebaran rata – rata sebesar 5,20. Variabel TI memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 30, nilai rata – rata variabel SAP masing – masing responden sebesar 24,28 dengan persebaran rata – rata sebesar 2,80. Variabel KSDM memiliki nilai minimum 14 dan maksimum 25, nilai rata – rata variabel KSDM masing – masing responden sebesar 20,06 dengan persebaran rata – rata sebesar 1,98. Variabel LK memiliki nilai minimum 25 dan maksimum 35, nilai rata – rata variabel LK masing – masing responden sebesar 30,48 dengan persebaran rata – rata sebesar 2,59

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Untuk mengukur keakuratan dari hasil penelitian dan menentukan apakah informasi yang dihasilkan dapat digunakan atau tidak dalam penelitian maka digunakan uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan hasil *Sig (2-tailed)* yang dihasilkan dengan jumlah signifikansi 5% atau 0.05. Tiap butir pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai

correlation sig (2-tailed) < 0.05. Uji ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *r* tabel dengan mencari *degree of freedom* (dF) terlebih dahulu, dimana dF didapatkan dengan rumus $N-2$, N merupakan jumlah sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $N = 81$, sehingga $dF = 81-2$ yaitu 79. R tabel yang digunakan tingkat signifikansinya sebesar 0.2185.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Validitas Variabel SAP

| No Pertanyaan | <i>Corrected Item</i> | r tabel | Keterangan |
|---------------|-----------------------|---------|------------|
| 1 | 0.737 | 0.2185 | Valid |
| 2 | 0.711 | 0.2185 | Valid |
| 3 | 0.877 | 0.2185 | Valid |
| 4 | 0.632 | 0.2185 | Valid |
| 5 | 0.581 | 0.2185 | Valid |
| 6 | 0.743 | 0.2185 | Valid |

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024)

Berdasarkan hasil uji validitas pada kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan pada variabel SAP dapat dinyatakan valid karena *r* hitung lebih besar dari *r* tabel yaitu 0,2185.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Validitas Variabel SPI

| No Pertanyaan | <i>Corrected Item</i> | r tabel | Keterangan |
|---------------|-----------------------|---------|------------|
| 1 | 0.768 | 0.2185 | Valid |
| 2 | 0.877 | 0.2185 | Valid |
| 3 | 0.918 | 0.2185 | Valid |
| 4 | 0.846 | 0.2185 | Valid |
| 5 | 0.839 | 0.2185 | Valid |
| 6 | 0.840 | 0.2185 | Valid |
| 7 | 0.694 | 0.2185 | Valid |
| 8 | 0.830 | 0.2185 | Valid |

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024)

Berdasarkan hasil uji validitas pada kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan pada variabel Sistem Pengendalian Intern dapat dinyatakan valid karena *r* hitung lebih besar dari *r* tabel yaitu 0,2185.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Validitas Variabel TI

| No Pertanyaan | <i>Corrected Item</i> | r tabel | Keterangan |
|---------------|-----------------------|---------|------------|
| 1 | 0.514 | 0.2185 | Valid |
| 2 | 0.690 | 0.2185 | Valid |
| 3 | 0.751 | 0.2185 | Valid |
| 4 | 0.647 | 0.2185 | Valid |
| 5 | 0.524 | 0.2185 | Valid |
| 6 | 0.759 | 0.2185 | Valid |

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024)

Berdasarkan hasil uji validitas pada kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2185.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Validitas Variabel KSDM

| No Pertanyaan | <i>Corrected Item</i> | r tabel | Keterangan |
|---------------|-----------------------|-----------|------------|
| 1 | 0.627 | 0.2185 | Valid |
| 2 | 0.646 | 0.2185 | Valid |
| 3 | 0.747 | 0.2185 | Valid |
| 4 | 0.724 | 0.2185 | Valid |
| 5 | 0.610 | 0.2185 | Valid |
| 6 | 0.709 | 0.2185 | Valid |
| 7 | 0.726 | 0.2185 | Valid |

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024)

Berdasarkan hasil uji validitas pada kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan pada variabel kompetensi sumber daya manusia dapat dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2185.

Pembahasan

Pengaruh pemahaman atas standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman aparatur pemerintah terhadap SAP, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemahaman yang baik terhadap SAP memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan (*compliance theory*), yang menekankan bahwa individu atau organisasi akan mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan apabila memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan tersebut. Dalam konteks ini, ketika aparatur pemerintah memahami SAP dengan baik, mereka cenderung lebih patuh dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan, yang berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2019), Pavitasari & Aisyah (2019), serta Nur (2019), yang menemukan bahwa pemahaman atas SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Mereka menyimpulkan bahwa pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi berkontribusi pada peningkatan keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dicapai melalui pelatihan yang berkelanjutan dan penguatan regulasi yang mendukung penerapan SAP secara lebih efektif.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, terutama dalam aspek pemahaman dan penerapan SAP. Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan rutin, menyediakan pedoman yang jelas, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat dalam implementasi SAP. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik terhadap SAP dapat memperkuat kepatuhan aparatur pemerintah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jayawijaya.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya

Pada penelitian ini, dilakukan pengujian terhadap pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) sebesar 0,510, yang lebih besar dari ($>$) 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan atau penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laporan keuangan belum mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rahayu (2020) serta Pratama dan Nugroho (2021), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak selalu berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan jika tidak diimbangi dengan faktor lain, seperti kompetensi pengguna dan kesiapan infrastruktur.

Dalam perspektif teori agensi (*agency theory*), pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat membantu agen (pemerintah daerah) dalam menyajikan informasi keuangan yang transparan dan akurat kepada prinsipal (masyarakat dan DPRD). Namun, dalam praktiknya, efektivitas teknologi informasi sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem, integrasi sistem keuangan yang baik, serta kebijakan pengelolaan yang mendukung optimalisasi teknologi. Jika faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka teknologi informasi tidak akan berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola teknologi informasi, baik melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur, maupun pengembangan sistem yang lebih terintegrasi. Tanpa adanya pemanfaatan teknologi yang optimal, potensi teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan tidak akan dapat dimaksimalkan secara efektif.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Jayawijaya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya. Dengan nilai signifikansi 0,824 yang lebih besar dari 0,05, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan adanya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian intern merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan yang baik, pelaksanaannya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena implementasi SPI yang belum efektif atau tidak konsisten, kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak

terkait, serta dominasi faktor lain seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan standar akuntansi yang lebih memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Dalam kaitannya dengan teori agensi, di mana terdapat hubungan antara prinsipal (pemerintah) dan agen (pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan), hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun SPI dirancang untuk meminimalkan asimetri informasi dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, penerapannya yang tidak optimal bisa menyebabkan tidak tercapainya tujuan peningkatan kualitas laporan keuangan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), sistem pengendalian intern yang lemah dapat menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan yang akurat dan transparan, yang mengarah pada rendahnya kualitas laporan keuangan. Dalam konteks ini, meskipun ada SPI, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut diterapkan dan dikendalikan oleh agen.

Selanjutnya, berdasarkan teori kepatuhan, di mana keberhasilan sistem pengendalian intern sangat bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang ada, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak yang terlibat dalam penerapan SPI berperan dalam rendahnya kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah, sebagai entitas yang harus mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang ditetapkan, harus memastikan bahwa setiap prosedur dan kebijakan internal dijalankan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Bastian (2016), yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern yang didukung oleh komitmen dan pemahaman yang memadai dari seluruh pihak terkait.

Peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di masa mendatang. Evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan SPI dan pelatihan bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan akan menjadi langkah yang signifikan untuk memastikan bahwa pengendalian intern dapat berfungsi dengan baik dan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini, penting untuk melihat faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja sistem pengendalian intern, seperti kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan implementasi standar akuntansi yang sesuai.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Jayawijaya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan nilai signifikansi sebesar 0,209 ($> 0,05$) oleh sebab itu hipotesis H_4 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kompetensi SDM dalam pemerintahan daerah mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis yang penting, Meskipun SDM memiliki kompetensi dasar, implementasi yang kurang optimal dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap menyebabkan KSDM belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*), temuan ini menunjukkan bahwa memiliki kompetensi yang memadai saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Teori kepatuhan menekankan bahwa individu dan organisasi akan mengikuti aturan apabila terdapat mekanisme pengawasan yang efektif serta insentif atau

sanksi yang jelas. Dengan demikian, meskipun aparaturnya pemerintah memiliki kompetensi yang baik, jika tidak didukung dengan kepatuhan terhadap SAP dan sistem pengendalian internal yang kuat, maka kualitas laporan keuangan tetap tidak dapat meningkat secara signifikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nugroho (2020) serta Widiyanti (2021), yang menemukan bahwa kompetensi SDM tidak selalu berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor lain, seperti sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi, dan regulasi yang ketat, lebih berperan dalam menentukan kualitas laporan keuangan di sektor publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada kompetensi SDM, tetapi juga memerlukan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat, penerapan standar akuntansi yang konsisten, serta sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik. Dengan adanya sinergi antara kompetensi SDM dan kepatuhan terhadap regulasi, diharapkan kualitas laporan keuangan dapat terus meningkat dan memenuhi standar akuntabilitas yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan.

Pengaruh pemahaman atas standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Jayawijaya

Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 21,626, yang lebih besar daripada ($>$) nilai F tabel sebesar 2,5396 (atau dibulatkan menjadi 2,54). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa secara simultan, variabel pemahaman atas standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Jayawijaya. Pemahaman yang baik terhadap SAP memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sejalan dengan teori agensi, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat (Setiawan, 2018). Selain itu, pemanfaatan TI yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, mengurangi potensi kesalahan manusia yang dapat memengaruhi kualitas laporan.

Dalam kerangka teori kepatuhan, penerapan sistem pengendalian intern yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang ada. SPI yang efektif membantu mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan menjamin laporan keuangan bebas dari salah saji, yang berdampak langsung pada kualitas laporan yang dihasilkan (Bastian, 2016). Kompetensi sumber daya manusia yang memadai juga memainkan peran penting, karena pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan dapat memastikan bahwa laporan yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penelitian sebelumnya oleh Sari (2017) juga menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang optimal, pemerintah daerah perlu memastikan pemahaman yang kuat terhadap SAP, pemanfaatan TI yang efektif, penerapan SPI yang baik, dan pengembangan kompetensi

SDM. Peningkatan dalam faktor-faktor ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel, sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel pemahaman atas standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Hasil uji pengaruh secara parsial menunjukkan bahwa:

- (1) Standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman atas standar akuntansi pemerintah, semakin tinggi kualitas laporan keuangan.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun teknologi informasi tersedia, efektivitasnya bergantung pada cara penggunaannya dalam mendukung proses pelaporan keuangan.
- (3) Sistem pengendalian intern secara parsial belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi sistem pengendalian intern yang kurang optimal menjadi salah satu faktor lemahnya pengaruh variabel ini terhadap kualitas laporan.
- (4) Kompetensi sumber daya manusia secara parsial belum cukup kuat untuk memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang ada belum cukup mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala yang dihadapi selama proses pengisian kuesioner di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah beberapa responden memerlukan pendampingan saat mengisi kuesioner. Situasi ini berpotensi menimbulkan bias dalam jawaban responden, yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan lainnya yaitu pengisian kuesioner diwakilkan oleh staf atau responden yang tidak sesuai kriteria, hal ini juga dapat menimbulkan bias yang pada akhirnya mempengaruhi hasil penelitian.

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan dukungan terhadap teori akuntansi pemerintahan, yang menekankan pentingnya penerapan standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa penerapan elemen-elemen tersebut berperan penting dalam memastikan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat dipercaya dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Hal ini sejalan dengan teori yang menyoroti bahwa pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan keselarasan antara kebijakan, teknologi, dan sistem pengendalian internal yang memadai.

Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pertama, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat penerapan standar akuntansi, terutama dalam mendukung penyajian laporan yang relevan dan andal. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan dengan cara memperbaiki infrastruktur yang mendukung pengelolaan keuangan serta memberikan pelatihan kepada pegawai agar mereka dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Ketiga, sistem pengendalian intern harus terus disempurnakan untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan terhindar dari kesalahan. Selain itu, meskipun kompetensi sumber daya manusia tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik, upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas kerja tetap perlu dilakukan untuk mendukung keberlanjutan perbaikan sistem pelaporan keuangan.

Saran

- (1) Untuk Pemerintah Daerah
 - (a) Perlu dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap penerapan sistem pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan.
 - (b) Pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai guna mendukung sistem pelaporan keuangan berbasis digital.
- (2) Untuk Penelitian Selanjutnya
 - (a) Pada penelitian ini hanya dilakukan *single case study* pada Kabupaten Jayawijaya, diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan *multiple cases study*.
 - (b) Menjadikan variabel kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi sehingga membantu memberikan wawasan lebih dalam.
 - (c) Penelitian lebih lanjut dapat memperluas cakupan wilayah atau menambah variabel lain yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti budaya organisasi atau dukungan politik.
 - (d) Disarankan menggunakan metode wawancara mendalam untuk melengkapi hasil dari kuesioner sehingga informasi yang diperoleh lebih komprehensif.
- (3) Untuk akademisi
 - (a) Kajian mengenai hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan perlu dilakukan di wilayah yang memiliki karakteristik berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih general.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda, F., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Kompetensi ASN, Kedisiplinan ASN, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Medan (Study Kasus pada BPKAD Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3788-3793.
- Aulia Nur, R. (2019). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: BPK RI. Diakses dari <https://www.bpk.go.id>.

- Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, penerbit salemba empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus SKPD provinsi dki jakarta). *Jurnal Tekun*, 8(1), 34-48.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337-348.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Lestari, I.N., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id.
- Laoh, O. E. H., & Tarore, M. L. (2018). Peranan Sektor Unggulan Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Jayawijaya. *Agri-Sosioekonomi*, 14(1), 263-270.
- Lumongga, R. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 112-125.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ningrum, W. M. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kota dan Kabupaten Magelang) (Doctoral).
- Pavitasari, E., & Aisyah, M. N. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 7(3).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019>
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*, 9(2).
- Pratama, A., & Nugroho, B. (2021). Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 12(1), 89-101.

- Pujanira P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Purba, R. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 112-124.
- Putra, A. (2017). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(3), 98-110.
- Rahman, A. (2020). *The impact of information technology on financial reporting quality in public sector organizations. Journal of Accounting and Public Policy*, 39(2), 1-12.
- Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh kompetensi sdm dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14-22.
- Rahmawati, N. (2018). Sistem Pengendalian Intern dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 7(1), 45-60.
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(05).
- Safitri, A. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Magelang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 55-68.
- Sari, N., & Rahayu, T. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(2), 134-147.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). *Research Methods for Business Student (7th ed., pp 5). Person Education Limited, amberton.edu*
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 8e. Wiley.*
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus Pemerintah Kota Semarang). *Solusi*, 17(4).
- Sutopo, E. Y., & Slamet, A. (2017). *Statistik inferensial. Penerbit Andi.*
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi :Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE*
- Taylor, S. E. (2006). *Psikologi Sosial. Triwibowo (terjemahan). Erlangga: Jakarta.*
- Udiyanti, N. L. N. (2014). Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014). Pengaruh Penerapan SAP, SPI Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesa Jrnal Akuntansi S1 (Volume 2 No. 1).*
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/>
- Widiyanti, T. (2021). Analisis Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(1), 67-80.
- Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., Raval, V., & Wong-On-Wing, B. (2000). *Accounting Information Systems-Essential Concepts and Applications. John Willey and Sons. Inc., USA.*